



## Peran Keluarga dalam Membangun Demokrasi yang Beradab

Nabila Salwa \*

Universitas Terbuka Palangka Raya, Indonesia

Email: [nabilasalwaanwarsani@gmailku.com](mailto:nabilasalwaanwarsani@gmailku.com)

\*Penulis korespondensi : [nabilasalwaanwarsani@gmailku.com](mailto:nabilasalwaanwarsani@gmailku.com)

**Abstract.** *Democracy is not only understood as a political system and state institutional mechanisms, but also as a value and culture of life that must be instilled from an early age. This article aims to examine the role of the family as the primary informal educational institution in developing a civilized democratic character in children. Through a literature review and descriptive-qualitative analysis, this article examines the concept of family-based democratic education, referring to theories of social and moral development and the dynamics of Indonesian democracy over time. The study's findings indicate that families play a strategic role in instilling democratic values such as justice, responsibility, tolerance, deliberation, and respect for differences through daily practices, including open dialogue, parental moral role models, the division of tasks and responsibilities, and children's involvement in family decision-making. Empirical findings from a case study in Yogyakarta confirm that children raised in democratic families have better social, emotional, and political awareness skills. Family-based democratic education has been shown not only to shape children's behavior within the home environment but also to prepare them to become critical, ethical citizens capable of constructive participation in society and the nation. Thus, the family is the primary and irreplaceable foundation for building a civilized and sustainable democracy.*

**Keywords:** *Citizen Participation, Civilized Democracy, Democratic Character, Democratic Education, Family.*

**Abstrak.** Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai sistem politik dan mekanisme kelembagaan negara, tetapi juga sebagai nilai dan budaya kehidupan yang harus ditanamkan sejak dini. Artikel ini bertujuan mengkaji peran keluarga sebagai institusi pendidikan informal pertama dalam membangun karakter demokratis anak yang beradab. Melalui pendekatan kajian pustaka dan analisis deskriptif-kualitatif, artikel ini menelaah konsep pendidikan demokrasi berbasis keluarga dengan merujuk pada teori perkembangan sosial dan moral serta dinamika demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Hasil kajian menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, tanggung jawab, toleransi, musyawarah, dan penghargaan terhadap perbedaan melalui praktik sehari-hari, antara lain dialog terbuka, keteladanan moral orang tua, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta pelibatan anak dalam pengambilan keputusan keluarga. Temuan empiris dari studi kasus di Yogyakarta memperkuat bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga demokratis memiliki keterampilan sosial, emosional, dan kesadaran politik yang lebih baik. Pendidikan demokrasi berbasis keluarga terbukti tidak hanya membentuk perilaku anak dalam lingkungan rumah, tetapi juga mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang kritis, beretika, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian, keluarga merupakan fondasi utama dan tidak tergantikan dalam membangun demokrasi yang beradab dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Demokrasi Beradab, Karakter Demokratis, Keluarga, Partisipasi Warga Negara, Pendidikan Demokrasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menekankan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga era Reformasi 1998, demokrasi selalu menjadi isu strategis yang menentukan arah pembangunan politik, sosial, dan budaya bangsa. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pemilu, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi juga merupakan suatu budaya dan nilai kehidupan yang harus ditanamkan secara konsisten sejak dini. Abraham Lincoln (1863) menyatakan bahwa demokrasi adalah

pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” sedangkan Dahl (1989) menekankan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan kolektif serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks ini, pendidikan demokrasi di keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang tidak hanya kritis dan rasional, tetapi juga beradab, menghargai perbedaan, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Keluarga sebagai lingkungan sosial pertama dan utama memiliki fungsi sentral dalam mendidik anak mengenai partisipasi, tanggung jawab, nilai keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Interaksi sehari-hari di rumah, seperti diskusi, musyawarah, pembagian tugas, dan penyelesaian konflik, menjadi sarana pembelajaran demokrasi yang efektif. Dengan menumbuhkan kebiasaan berdialog, mendengarkan pendapat anggota keluarga lain, dan menghargai perbedaan, anak secara bertahap belajar praktik demokrasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosialnya. Pendidikan demokrasi melalui keluarga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan keempat, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keluarga bukan hanya tempat pengasuhan dan perlindungan fisik, tetapi juga institusi pendidikan politik dan moral yang membentuk karakter demokratis sejak usia dini, sekaligus menjadi pondasi bagi pembelajaran sosial-politik anak di lingkungan yang lebih luas.

Dalam konteks sejarah, perjalanan demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Masa Orde Lama menekankan demokrasi terpimpin dengan dominasi kekuasaan pusat, sedangkan masa Orde Baru menghadirkan sistem politik otoriter yang membatasi partisipasi warga dan kebebasan berpendapat. Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menekankan kembali prinsip kebebasan sipil, hak politik, dan penguatan lembaga demokrasi. Dinamika sejarah ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang demokrasi bukan hanya bersifat prosedural atau mekanistik, tetapi juga harus ditanamkan secara budaya sejak dini agar warga negara memiliki integritas, tanggung jawab, dan kesadaran sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi yang beradab harus dimulai sejak keluarga karena anak belajar pertama kali melalui interaksi di rumah. Lingkungan keluarga yang menghargai perbedaan, mendorong diskusi, dan menekankan musyawarah menciptakan basis karakter demokratis yang paling efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai pengawas moral bagi anak. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah menjadi fondasi penting bagi anak dalam bersikap demokratis di masyarakat. Anak yang terbiasa diajak berdiskusi tentang keputusan keluarga, menghargai

pendapat saudara, dan bertanggung jawab atas tugasnya akan lebih mampu mengekspresikan pandangan secara sopan, menghormati hak orang lain, dan berpartisipasi dalam komunitas sosial secara konstruktif. Dengan demikian, pendidikan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti sekolah, tetapi keluarga memiliki peran strategis sebagai agen utama yang menyiapkan generasi penerus bangsa yang kritis, beretika, dan mampu menerapkan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa keluarga bukan sekadar unit sosial, tetapi institusi pendidikan demokrasi yang menentukan kualitas partisipasi dan tanggung jawab anak sebagai warga negara di masa depan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Modul MKWU 4109 Pendidikan Kewarganegaraan, keluarga merupakan agen pendidikan informal pertama dan terpenting yang membentuk karakter demokratis anak. Keluarga tidak hanya menyediakan pengasuhan fisik, tetapi juga menjadi lingkungan utama di mana anak belajar nilai-nilai moral, etika, dan sosial yang mendasari praktik demokrasi. Nilai-nilai seperti keadilan, musyawarah mufakat, toleransi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebaiknya ditanamkan sejak usia dini agar anak terbiasa menghormati perbedaan dan bersikap adil dalam interaksi sosial. Hurlock (2012) menekankan bahwa pengalaman awal di lingkungan keluarga sangat menentukan pola pikir, emosi, dan perilaku anak di masa depan. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan komunikatif cenderung mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, serta keterampilan sosial yang baik.

Tilaar (2016) menambahkan bahwa pendidikan demokrasi bertujuan menumbuhkan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu menghormati pluralitas budaya, agama, dan pandangan politik. Pendidikan demokrasi dalam keluarga tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis melalui interaksi sehari-hari, seperti keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan keluarga, pembagian tugas, dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Siregar (2020) menemukan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan komunikasi terbuka lebih mampu menghargai pendapat orang lain, bersikap kooperatif, dan memiliki keterampilan sosial yang mendukung partisipasi dalam kelompok maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dalam keluarga secara langsung memengaruhi kemampuan anak untuk menerapkan prinsip demokrasi di kehidupan sosial.

Susanto (2020) menambahkan bahwa keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan keluarga memperkuat kesadaran politik dan tanggung jawab sosial sejak dini. Anak yang terbiasa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ikut menentukan keputusan belajar menghargai proses musyawarah, memahami konsekuensi tindakan, serta

mengembangkan tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama. Selain itu, penelitian dari jurnal pendidikan kontemporer menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi dalam keluarga secara signifikan meningkatkan partisipasi anak dalam organisasi sosial, kegiatan komunitas, dan aktivitas sekolah (Putra & Mahendra, 2019). Temuan ini membuktikan bahwa praktik demokrasi yang diajarkan di rumah tidak berhenti pada level keluarga, tetapi dapat diteruskan dan diterapkan dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga membentuk generasi muda yang berkarakter, kritis, dan berintegritas.

### **3. PEMBAHASAN**

Peran keluarga dalam membangun demokrasi yang beradab dapat diwujudkan melalui berbagai aspek yang saling terkait, saling memperkuat, dan secara konsisten membentuk karakter demokratis anak. Keluarga bukan hanya tempat pengasuhan dan perlindungan fisik, tetapi juga institusi pendidikan informal pertama yang menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan politik. Setiap interaksi, kebiasaan, dan keputusan yang diambil di lingkungan keluarga memberikan pengalaman belajar yang membentuk kemampuan berpikir kritis, empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial anak. Berikut adalah aspek-aspek penting yang mendukung pembentukan karakter demokratis melalui keluarga:

#### **1. Ruang dialog yang sehat**

Keluarga harus menjadi tempat dialog terbuka di mana setiap anggota, termasuk anak-anak, dapat menyampaikan pendapat, ide, dan aspirasi tanpa tekanan atau intimidasi. Diskusi yang rutin dalam menyelesaikan konflik rumah tangga atau mengambil keputusan sehari-hari melatih anak untuk berpikir kritis, menganalisis masalah, dan berargumentasi secara logis. Menurut Piaget (1972), kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan berkembang optimal melalui interaksi sosial yang aktif dan konstruktif. Dengan membiasakan anak berdiskusi tentang keputusan sederhana, seperti pembagian tugas atau perencanaan kegiatan keluarga, anak belajar menghargai sudut pandang lain, memahami proses musyawarah, serta menginternalisasi prinsip-prinsip demokrasi sejak dini. Selain itu, dialog yang sehat membangun keterampilan komunikasi yang efektif, kesabaran dalam mendengarkan, dan kemampuan mengekspresikan pendapat secara tepat dan sopan, yang semuanya menjadi fondasi penting bagi partisipasi anak dalam masyarakat demokratis di masa depan.

#### **2. Teladan moral dari orang tua**

Teladan perilaku moral dari orang tua, seperti kejujuran, keadilan, disiplin, tanggung jawab, dan menghormati hak orang lain, menjadi fondasi penting dalam pembentukan

karakter demokratis anak. Bandura (1977) menjelaskan bahwa anak cenderung meniru perilaku yang diperlihatkan oleh figur utama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perilaku adil orang tua dalam pengambilan keputusan, pemberian penghargaan atau hukuman, serta penyelesaian konflik menjadi model yang dipelajari anak. Dengan melihat orang tua bertindak secara etis, anak belajar menghargai hak orang lain, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta menumbuhkan kemampuan moral dan sosial yang mendukung praktik demokrasi. Teladan ini juga menanamkan sikap empati dan rasa keadilan, sehingga anak tidak hanya kritis tetapi juga beretika dalam berinteraksi dengan sesama.

### **3. Pembagian tugas dan tanggung jawab**

Melalui pembagian tugas rumah tangga, anak diajarkan kesetaraan peran, kerja sama, dan tanggung jawab. Misalnya, anak diberi tanggung jawab untuk membersihkan ruang tertentu, membantu merencanakan kegiatan keluarga, atau mendukung anggota keluarga lain dalam pekerjaan rumah. Pembiasaan ini menanamkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan demi kepentingan bersama. Selain itu, pembagian tanggung jawab melatih anak keterampilan organisasi, manajemen waktu, disiplin, dan empati terhadap peran orang lain. Proses ini juga memberikan pengalaman nyata tentang pentingnya kontribusi individu dalam komunitas, yang kemudian dapat diterapkan pada konteks sosial yang lebih luas.

### **4. Toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman**

Indonesia memiliki keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang kaya. Keluarga yang mengajarkan toleransi, saling menghargai, dan menerima perbedaan akan menumbuhkan anak yang mampu menghormati orang lain dan berperilaku demokratis. Praktik toleransi di rumah dapat diwujudkan dengan menghormati pendapat berbeda, merayakan berbagai tradisi keluarga, atau menghargai perbedaan dalam pengambilan keputusan. Pengalaman ini menjadi latihan nyata bagi anak untuk memahami nilai pluralisme dan menghargai hak orang lain. Menurut Tilaar (2016), anak yang terbiasa hidup dalam lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, mengembangkan sikap saling menghormati, dan berperan aktif dalam masyarakat multikultural.

### **5. Literasi digital dan pengawasan informasi**

Di era digital, keluarga memiliki peran penting dalam membimbing anak memilah informasi, menilai sumber berita, serta menghindari hoaks atau ujaran kebencian. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kesadaran kritis

terhadap informasi yang diterima dan kemampuan menganalisis konten secara objektif. Dengan membekali anak kemampuan literasi digital sejak dini, keluarga mendukung pengembangan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam berpartisipasi secara demokratis. Literasi digital juga mendorong anak untuk menyaring pengaruh negatif media sosial dan menggunakan teknologi sebagai sarana belajar dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

## **6. Kegiatan sosial dan partisipasi aktif**

Keluarga dapat melibatkan anak dalam berbagai kegiatan sosial, seperti diskusi kelompok, organisasi anak, kegiatan gotong royong, atau pengabdian masyarakat. Anak yang terbiasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sosial belajar untuk berkomunikasi secara efektif, menyampaikan pendapat, bekerja sama, dan menghormati orang lain. Studi kasus di beberapa keluarga di Yogyakarta menunjukkan bahwa anak yang aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga memiliki keterampilan sosial dan politik lebih baik dibanding anak yang tidak dilibatkan. Mereka lebih percaya diri, lebih berani menyampaikan pendapat, dan lebih mampu memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan demokrasi berbasis keluarga bukan hanya teori, tetapi pengalaman nyata yang membentuk karakter demokratis anak, yang nantinya dapat diteruskan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Studi kasus yang dilakukan di beberapa keluarga di Yogyakarta menunjukkan bahwa anak-anak yang secara rutin dilibatkan dalam pengambilan keputusan keluarga memiliki keterampilan sosial, emosional, dan politik yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak terlibat. Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan anggota keluarga, yang menekankan bagaimana proses musyawarah, diskusi terbuka, dan tanggung jawab bersama membentuk kemampuan anak untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Anak-anak yang terbiasa didorong untuk menyampaikan pendapatnya belajar untuk berpikir kritis, mendengarkan argumen orang lain, dan menghargai perbedaan pendapat.

Temuan ini sejalan dengan teori perkembangan sosial dan moral dari Vygotsky (1978), yang menyatakan bahwa interaksi sosial adalah medium utama dalam pembelajaran nilai-nilai dan keterampilan sosial. Anak-anak yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan juga menunjukkan kesadaran politik yang lebih tinggi, kemampuan memecahkan masalah secara kolektif, serta rasa tanggung jawab yang lebih kuat terhadap lingkungan sekitar. Hal ini menegaskan bahwa praktik demokrasi yang diajarkan di rumah tidak hanya membentuk

perilaku sehari-hari, tetapi juga menyiapkan anak untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan beradab di masyarakat luas.

Dengan demikian, pendidikan demokrasi berbasis keluarga bukan sekadar teori atau nilai abstrak, tetapi merupakan pengalaman nyata yang membekali anak dengan kompetensi sosial-politik, etika, dan moral. Melalui praktik sehari-hari, seperti berdiskusi terbuka, berbagi tanggung jawab, menghargai perbedaan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga, anak belajar memahami prinsip-prinsip demokrasi secara konkret. Bandura (1977) menekankan bahwa anak meniru perilaku figur utama dalam kehidupannya, sehingga praktik demokrasi yang konsisten di rumah akan membentuk pola pikir kritis, kemampuan berargumentasi, dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara konsisten akan berkontribusi secara signifikan terhadap terciptanya generasi muda yang sadar hak, menghargai perbedaan, dan mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan demokratis di tingkat lokal maupun nasional. Selain membentuk karakter demokratis, keluarga juga mempersiapkan anak menghadapi tantangan masyarakat modern, termasuk pluralitas budaya, dinamika sosial, dan informasi digital. Pendidikan demokrasi yang kuat di rumah menciptakan fondasi bagi anak untuk menjadi warga negara yang aktif, beradab, dan bertanggung jawab, yang mampu menyelesaikan konflik secara musyawarah, mengambil keputusan secara rasional, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial-politik yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran keluarga menjadi sangat strategis dan tidak tergantikan dalam membangun masyarakat demokratis yang beradab dan berkelanjutan.

#### **4. PENUTUP**

##### **Simpulan**

Keluarga memainkan peran strategis dan fundamental dalam membangun demokrasi yang beradab, karena merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pembentukan karakter, moral, dan nilai-nilai demokratis anak. Melalui praktik dialog yang sehat, teladan moral dari orang tua, pembagian tanggung jawab, penanaman sikap toleransi, literasi digital, dan partisipasi sosial dalam kehidupan sehari-hari, keluarga berfungsi sebagai agen pendidikan informal yang efektif. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan sosial yang baik, kesadaran politik, dan kemampuan untuk menghargai hak orang lain. Dengan demikian, keluarga bukan hanya tempat pengasuhan dan perlindungan fisik, tetapi juga institusi

pendidikan politik, sosial, dan moral yang menyiapkan generasi muda untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis.

### Saran

Diperlukan sinergi yang kuat antara keluarga, sekolah, dan pemerintah untuk memperkuat pendidikan demokrasi secara menyeluruh. Orang tua disarankan untuk meningkatkan kompetensi parenting berbasis karakter melalui pelatihan, seminar, dan literatur yang mendukung pengembangan nilai-nilai demokratis pada anak. Sekolah sebaiknya memperkuat pendidikan kewarganegaraan dengan menekankan pembelajaran partisipatif, diskusi, dan proyek sosial yang menanamkan keterampilan demokrasi praktis. Pemerintah perlu menyediakan fasilitas edukatif, program literasi politik dan digital, serta kebijakan yang mendukung penguatan budaya demokrasi di masyarakat, termasuk melalui program-program komunitas, media edukatif, dan akses teknologi informasi yang aman. Sinergi ini akan menciptakan ekosistem pendidikan demokrasi yang terpadu, membentuk generasi muda yang kritis, beradab, dan mampu berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa.

### DAFTAR REFERENSI

- Abraham Lincoln. (1863). *Gettysburg Address*. Washington, D.C.: Library of Congress.
- Aulia, M., Misnawati, M., Apritha, A., Setyoningsih, R. A., Handayani, P., & Saptaniarsih, W. (2023). Pelajar Pancasila Pada Abad Ke-21 Di SMAN 1 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 134-151. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i1.633>
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Halimah, H., Misnawati, M., Lestaringtyas, S. R., Mingvianita, Y., Sepmiate, S., & Suryatini, R. I. (2023). Implementasi Pancasila Sebagai Entitas Dan Identitas Pendidikan Abad Ke-21 di SMAN 4 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 119-133. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i1.632>
- Hurlock, E. (2012). *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Modul MKWU 4109 Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Terbuka.
- Nata, A. (2018). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Piaget, J. (1972). *The Psychology of the Child*. New York: Basic Books.



- Putra, R., & Mahendra, S. (2019). Peran keluarga dalam pendidikan demokrasi anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 24(3), 45-59.
- Putri, G. E., Misnawati, M., Syahadah, D., Sari, Y., Ummy, R., & Nurfitria, I. (2023). Pengamalan Nilai Profil Pelajar Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Pada Era Digital Di SMPN 6 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 171-190. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i1.635>
- Sari, S. A. T., Misnawati, M., Rusdiansyah, R., Taufandy, L. A., Maya, S., & Nitiya, R. (2023). Pancasila Sebagai Entitas Dan Identitas Bangsa Indonesia Dan Perwujudannya Di SMAN 5 Palangka Raya. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(1), 152-170. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v2i1.634>
- Siregar, S. (2020). *Demokrasi dan Pendidikan Karakter*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A. (2020). *Pendidikan Keluarga sebagai Basis Karakter Bangsa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2016). *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.